



FAKULTAS  
BISNIS, HUKUM  
DAN ILMU SOSIAL



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# POLICY BRIEF

**MEWUJUDKAN PENDUDUK YANG TANGGUH:  
STRATEGI PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA UNTUK  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oleh:

**Lailul Mursyidah, M.AP**

# PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Selaras dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, melihat jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang cukup besar beserta dinamika yang menyertainya, maka perlu disusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2045.

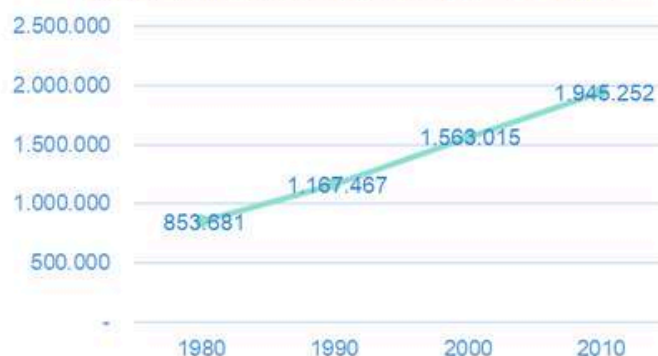




# DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk tertinggi ke empat di antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dari hasil sensus penduduk tahun 1980-2010 terus mengalami perkembangan. Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 26,88 persen dari tahun 1980. Selanjutnya meningkat 25,31 persen pada tahun 2000 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 19,65 persen.

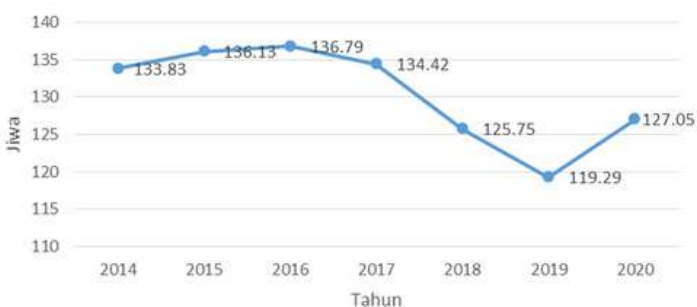
Jumlah Penduduk Hasil Sensus 1980 - 2010



Rasio jenis kelamin – perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah 101,67 persen. Ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 perempuan terdapat 101-102 laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo mendekati nilai ideal karena mendekati 100 persen. Dalam perkembangannya sejak tahun 2014 angka rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Sidoarjo konstan

Tahun	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
2014	2.127.043	101,73
2015	2.161.659	101,76
2016	2.223.002	101,80
2017	2.207.600	101,69
2018	2.238.069	101,68
2019	2.266.533	101,67
2020	2.033.764	101,01

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2020



Angka Pengangguran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2020



# KESIMPULAN

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada lima aspek pembangunan kependudukan meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan manajemen data base dan informasi penduduk.

1. Pengendalian kuantitas penduduk meliputi pengendalian fertilitas, penguatan sistem informasi dan data pendukung pengendalian kuantitas penduduk, program pemberdayaan pendukung pengendalian kuantitas penduduk, dan evaluasi lima tahunan pelaksanaan kebijakan kependudukan sampai Tahun 2045
2. Peningkatan kualitas penduduk melalui mengurangi ketimpangan dan kemiskinan perkotaan secara berkelanjutan, meningkatkan status ekonomi penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan prinsip perluasan kesempatan kerja untuk Angkatan Kerja dan Penduduk Usia Produktif, peningkatan pendapatan penduduk melalui pengembangan mata pencaharian hidup yang berkelanjutan, dan mengembangkan ekonomi regional berbasis pada pengembangan on demand ekonomi dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi dan konektivitas kawasan strategis Gerbang Kertosusila.
3. Pembangunan keluarga melalui berbagai strategi yaitu membangun Keluarga Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; dan membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
4. Pengarahannya dalam mencapai tujuan kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Sidoarjo yaitu menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis; menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah; mengendalikan kuantitas penduduk dalam jangka panjang; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran perkotaan; memperluas kesempatan kerja produktif bagi angkatan kerja baru; menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran; meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; dan meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.
5. Pengembangan sistem informasi dan administrasi data kependudukan dilakukan melalui pemantapan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk Instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep Government to Government (G2G), layanan SIK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2006.

# REKOMENDASI

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung target-target perencanaan kebijakan dalam GDPK tahun 2020-2045 meliputi:

1. Harmonisasi dan intensifikasi regulasi antar instansi terkait pemanfaatan database kependudukan dari pelayanan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Rumah Dataku.
2. Optimalisasi dan sinkronisasi tupoksi antar OPD sehingga pelaksanaan pembangunan kependudukan dapat berjalan efektif.
3. Koordinasi dan sinergi kegiatan antar OPD dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam mendukung penerapan aplikasi SIAK dan Rumah Dataku sebagai sistem pengelola database kependudukan.
5. Peningkatan kesiapan sarana prasarana aplikasi SIAK dan tata kelola IT serta pemanfaatan data base kependudukan.

